



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PAKTA INTEGRITAS

Dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan, pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. Kepala/KPA (kode satker), selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
 - **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** tersebut secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".
 - **PARA PIHAK** dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan unit kerja yang dipimpin.
 - **PARA PIHAK** telah melakukan kesepakatan dalam suatu **PAKTA INTEGRITAS** berkenaan dengan tugas pelayanan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** dengan ketentuan sebagai berikut

PERTAMA

Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA, PIHAK KETIGA** tidak akan memberikan atau menawarkan suap dan/atau gratifikasi yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.

KETIGA

PARA PIHAK tidak akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk menekan **PIHAK** lain agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan perorangan/golongan tertentu.

KEEMPAT

PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi moral sesuai Kode Etik Pegawai dan/atau tuntutan ganti rugi/pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas.

Demikian **PAKTA INTEGRITAS** ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	PIHAK KEDUA Kepala KPPN Surakarta	PIHAK KETIGA Kepala/KPA
.....		

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
	PROVINSI JAWA TENGAH
	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
	SURAKARTA
	JL.SLAMET RIYADI NO. 467, SURAKARTA 57146; TELEPON (0271) 711261; FAKSIMILE (0271) 710648; SUREL KPPN028@GMAIL.COM; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/SURAKARTA

BERITA ACARA PENYERAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2022
No. BA - /KPN.1403/2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertandatangan di bawah ini :

I.	Nama	:	
	NIP	:	
	Jabatan	:	Kepala KPPN Surakarta
	Kepala KPPN Surakarta sebagai Kuasa BUN selaku PIHAK PERTAMA		
II.	Nama	:	
	NIP/NRP	:	
	Jabatan	:	
	Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (<i>kode satker</i>) selaku PIHAK KEDUA		

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor tanggal 17 November 2021 untuk Satuan Kerja (*kode satker*) kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dengan sesungguhnya.

PIHAK PERTAMA Kepala KPPN Surakarta NIP	PIHAK KEDUA KPA Satker NIP/NRP
---	--